

MENGUJI BATAS KEWENANGAN ICC: STUDI KRITIS ATAS RESPONS DUTERTE TERHADAP INVESTIGASI DUGAAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI FILIPINA

Muniratri Rachmita¹, Diandra Ratuolinka²

Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: 2410611073@mahasiswa.upnvj.ac.id¹ 2410611062@mahasiswa.upvj.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>The alleged crimes against humanity committed during the "War on Drugs" campaign in the Philippines under President Rodrigo Duterte present a significant test of the International Criminal Court's (ICC) authority. Although the Philippines officially withdrew from the Rome Statute in 2019, the ICC continues to assert jurisdiction over crimes committed during its period of membership. In March 2025, Duterte was arrested and surrendered to the ICC, marking a critical precedent in international law. However, the process has been entangled with political maneuvering, domestic resistance, and geopolitical imbalance, all of which undermine the credibility of international legal enforcement. This article employs a normative-empirical method and case study approach to critically examine the legitimacy of the ICC's jurisdiction, the domestic political dynamics in the Philippines, and the legal and political implications of the case. The findings suggest that while the ICC has a strong legal basis, the pursuit of international justice remains heavily influenced by complex political contests and issues of national sovereignty.</i> Keywords : ICC, Duterte, Philippines, crimes against humanity, jurisdiction, sovereignty, politicization of international law.

Abstrak

Kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama kampanye "War on Drugs" di Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte menjadi ujian tajam bagi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma pada 2019, ICC tetap mengklaim yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi selama masa keanggotaan. Pada Maret 2025, Duterte ditangkap dan diserahkan ke ICC, menandai preseden penting dalam hukum internasional. Namun, proses ini tidak lepas dari politisasi, resistensi domestik, dan ketidakseimbangan geopolitik yang memperlemah kredibilitas penegakan hukum internasional. Artikel ini menggunakan metode normatif-empiris dan studi kasus untuk mengkritisi legitimasi yurisdiksi ICC, dinamika politik domestik Filipina, serta implikasi hukum dan politik dari kasus ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki dasar hukum kuat, proses penegakan keadilan internasional masih sangat dipengaruhi oleh pertarungan politik dan kedaulatan nasional yang kompleks.

Kata Kunci : ICC, Duterte, Filipina, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Yurisdiksi, Kedaulatan, Politisasi Hukum Internasional.

A. PENDAHULUAN

Kampanye “war on drugs” yang diluncurkan Duterte sejak 2016 menimbulkan tuduhan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan di luar proses hukum yang menewaskan ribuan warga sipil. ICC membuka penyelidikan pada 2018, namun Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada Maret 2019 sebagai respons keras terhadap penyelidikan tersebut.

Kampanye “war on drugs” yang diluncurkan oleh Presiden Rodrigo Duterte sejak Juni 2016 telah menimbulkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berupa pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killings) yang menewaskan lebih dari 12.000 warga Filipina, sebagian besar berasal dari kalangan miskin perkotaan. Kampanye ini dikenal dengan pendekatan keras yang mengizinkan aparat kepolisian dan kelompok vigilante melakukan penindakan tanpa proses hukum yang jelas, yang menurut laporan Human Rights Watch dan organisasi HAM lainnya, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte sendiri secara terang-terangan mengancam akan membunuh para pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bahkan sebelum resmi menjabat presiden, yang kemudian menjadi landasan kebijakan represifnya.

Menanggapi tuduhan ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) membuka penyelidikan awal pada Februari 2018 untuk menilai apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya pembunuhan massal yang sistematis. ICC menegaskan bahwa penyelidikan ini mencakup periode sejak Filipina menjadi negara pihak Statuta Roma pada 1 November 2011 hingga penarikan diri Filipina yang efektif pada 17 Maret 2019. Meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma pada Maret 2019 sebagai respons keras terhadap penyelidikan ICC, Mahkamah tetap mengklaim memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi selama Filipina masih menjadi anggota.

Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma juga dipandang sebagai upaya untuk menghindari akuntabilitas internasional dan mempertahankan kedaulatan nasional atas sistem peradilan domestik yang dinilai tidak efektif dalam mengusut pelanggaran HAM tersebut. Pemerintah Duterte secara konsisten menolak kerja sama dengan ICC dan menyebut penyelidikan sebagai bentuk campur tangan asing yang tidak dapat diterima, menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional. Namun, kritik dari komunitas internasional dan organisasi HAM menilai bahwa sistem peradilan nasional Filipina gagal menjalankan fungsi tersebut secara serius, sehingga membuka ruang bagi ICC untuk bertindak berdasarkan prinsip complementarity.

Kasus ini menyoroti bagaimana hukum internasional, khususnya kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berhadapan dengan realitas politik domestik yang sarat dengan dinamika dinasti politik, nasionalisme, dan resistensi terhadap intervensi asing.

Secara politik, kasus ini memperlihatkan persaingan sengit antara dua dinasti politik terbesar di Filipina, yakni keluarga Duterte dan keluarga Marcos. Penangkapan dan penyerahan Duterte ke ICC pada Maret 2025 bukan hanya sebuah tindakan hukum, tetapi juga bagian dari pergulatan kekuasaan yang melibatkan elite politik nasional. Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang awalnya menolak kerja sama dengan ICC, akhirnya mengizinkan penangkapan Duterte, yang sekaligus menjadi kemenangan politik bagi keluarga Marcos. Hal ini memperkuat posisi Marcos di mata komunitas internasional dan melemahkan pengaruh keluarga Duterte, khususnya setelah ketegangan politik yang memuncak antara kedua keluarga tersebut, termasuk perseteruan antara Sara Duterte, putri mantan presiden, dan Marcos Jr. sebagai presiden saat ini.

Dari sisi sosial, kasus ini menggugah kesadaran publik Filipina dan dunia internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama kampanye anti-narkoba. Korban dan keluarga korban menyambut penangkapan Duterte sebagai langkah penting menuju keadilan dan akuntabilitas, setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan impunitas. Namun, di sisi lain, dukungan signifikan terhadap Duterte masih bertahan di kalangan masyarakat, terutama di wilayah asalnya seperti Davao, yang menunjukkan polarisasi opini publik yang tajam. Narasi nasionalisme yang dibangun oleh Duterte selama masa jabatannya juga memperkuat resistensi terhadap apa yang dianggap sebagai campur tangan asing, sehingga memperumit proses penegakan hukum internasional.

B. Tinjauan Pustaka

Teori dan Konsep

Yurisdiksi ICC

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) ditentukan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu *ratione materiae*, *ratione temporis*, dan *ratione personae*. Ketiga aspek ini menjadi landasan hukum dalam menentukan apakah ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili suatu perkara.

1. *Ratione materiae* (ruang lingkup jenis kejahatan)

Aspek *ratione materiae* merujuk pada jenis kejahatan yang berada dalam lingkup yurisdiksi substansial ICC. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili empat kategori utama kejahatan internasional, yaitu:

- a. Kejahatan genosida – tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama tertentu.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan – serangkaian tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, atau penganiayaan yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil.
- c. Kejahatan perang – pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.
- d. Kejahatan agresi – penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB.

Dalam konteks kasus Duterte, ICC mengkaji tindakan-tindakan selama kampanye “War on Drugs” yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama mengingat adanya dugaan pembunuhan sistematis terhadap ribuan warga sipil.

2. *Ratione temporis* (ruang lingkup waktu)

Aspek *ratione temporis* berkaitan dengan periode waktu terjadinya kejahatan. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku bagi negara yang bersangkutan. Dalam kasus Filipina, Statuta Roma mulai berlaku pada 1 November 2011, karena Filipina meratifikasi Statuta tersebut pada tahun 2011. Oleh karena itu, ICC hanya berwenang menyelidiki kejahatan yang terjadi sejak tanggal tersebut hingga Filipina resmi menarik diri dari Statuta pada 17 Maret 2019. Meskipun Filipina telah keluar dari ICC, yurisdiksi tetap berlaku untuk kejahatan yang terjadi selama masa keanggotaan negara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma.

3. *Ratione personae* (ruang lingkup subjek hukum)

Aspek *ratione personae* menunjukkan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas individu, bukan negara. Mahkamah ini mengadili tanggung jawab pidana individual terhadap pelaku kejahatan internasional, termasuk pejabat tinggi negara, seperti kepala negara atau pemerintahan. Dengan demikian, posisi Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina tidak membebaskannya dari kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada kekebalan terhadap kejahatan internasional berat di bawah yurisdiksi ICC, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Statuta Roma.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan hukum internasional serta studi kasus untuk menganalisis secara komprehensif kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kampanye “War on Drugs” di Filipina. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang relevan, khususnya terkait yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Statuta Roma dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali dinamika faktual yang terjadi di lapangan, termasuk respons dari otoritas domestik Filipina, masyarakat internasional, dan aktor-aktor terkait lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, yang mencakup dokumen resmi dari ICC (seperti putusan, perintah penyelidikan, dan laporan kemajuan), pernyataan publik pejabat pemerintah Filipina, laporan dari organisasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, serta pemberitaan media arus utama yang kredibel. Selain itu, penulis juga memanfaatkan literatur akademik yang relevan untuk mendukung kerangka analisis.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan kritis, untuk mengidentifikasi ketegangan antara prinsip-prinsip hukum internasional dan realitas politik dalam penerapannya. Penelitian ini juga memperhatikan dimensi geopolitik yang memengaruhi legitimasi dan efektivitas ICC dalam menegakkan hukum, serta bagaimana aspek kedaulatan negara berinteraksi dengan tuntutan keadilan internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan peristiwa, tetapi juga mengkritisi struktur dan dinamika kekuasaan dalam hukum internasional kontemporer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan ICC atas Filipina dalam Konteks Kejahatan Kemanusiaan

Meskipun Filipina menarik diri pada Maret 2019, Pasal 127 Statuta Roma mengatur bahwa penarikan berlaku satu tahun setelah pemberitahuan, dan ICC tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi selama masa keanggotaan (1 November 2011–16 Maret 2019). ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Duterte pada 7 Maret 2025 dan menahan mantan presiden tersebut pada 12 Maret 2025.

Namun, tantangan hukum dari tim pembela Duterte yang menolak yurisdiksi ICC dianggap "fundamentally flawed" oleh jaksa ICC, yang menegaskan bahwa penarikan Filipina tidak menghilangkan kewenangan pengadilan atas kejahatan masa lalu. Ini menegaskan kekuatan hukum ICC, tetapi juga membuka ruang bagi kritik terkait legitimasi intervensi terhadap negara yang secara formal telah keluar.

Respons Duterte terhadap Investigasi ICC

Duterte secara konsisten menolak kerja sama dengan ICC, menyebut penyelidikan sebagai "campur tangan asing" yang merusak kedaulatan Filipina. Penarikan Filipina dari Statuta Roma dan narasi nasionalisme ini berfungsi sebagai alat politik untuk mempertahankan dukungan domestik.

Penangkapan Duterte pada Maret 2025 terjadi di tengah perseteruan sengit antara keluarga Duterte dan Marcos, dua dinasti politik dominan Filipina. Presiden Marcos Jr. awalnya menolak kerja sama dengan ICC, bahkan menginstruksikan aparat untuk tidak membantu penyelidikan ICC pada 2023. Namun, secara pragmatis, pemerintah Marcos membiarkan penangkapan dan penyerahan Duterte ke ICC, yang mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan penggunaan hukum internasional sebagai alat politik domestik.

Implikasi Hukum dan Politik atas Ketegangan antara ICC dan Filipina

Penangkapan Duterte menjadi preseden penting dalam hukum internasional, menegaskan bahwa mantan kepala negara tidak kebal dari hukum internasional. Namun, kasus ini juga memperlihatkan politisasi hukum internasional yang nyata. ICC gagal menindak tokoh kuat geopolitik lain, seperti kasus Israel dan Rusia, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang selektivitas dan ketidakseimbangan penegakan hukum internasional.

Penolakan kerja sama pemerintah Filipina sebelumnya dan ketegangan politik domestik menimbulkan hambatan besar bagi proses hukum ICC. Penangkapan Duterte juga memicu ketegangan domestik, dengan keluarga Duterte mengecam sebagai pelanggaran kedaulatan dan Marcos menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Selain itu, proses hukum terhadap Duterte yang berusia lanjut dan kondisi kesehatannya yang rapuh menimbulkan dilema etis dan praktis, yang dapat mengurangi kredibilitas ICC sebagai lembaga hukum independen.

E. KESIMPULAN

Kasus Duterte menegaskan bahwa ICC dapat mempertahankan kewenangannya meskipun negara terkait menarik diri dari Statuta Roma, dengan menerapkan prinsip retroaktif dan complementarity. Namun, proses hukum ini sangat dipengaruhi oleh politisasi, resistensi domestik, dan ketidakseimbangan geopolitik yang melemahkan kredibilitas penegakan hukum internasional. Penangkapan Duterte menjadi simbol kemenangan hukum internasional sekaligus refleksi kompleksitas politik dan kedaulatan yang membayangi penegakan keadilan global.

F. Rekomendasi

1. Bagi ICC: Perlu memperkuat legitimasi dan konsistensi penegakan hukum dengan mengurangi pengaruh politik geopolitik, meningkatkan kerja sama dengan negara anggota, dan mengembangkan mekanisme perlindungan bagi terdakwa rentan.
2. Bagi Filipina dan Komunitas Internasional: Dorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran HAM, memperkuat sistem peradilan nasional, dan menghindari politisasi kasus demi keadilan berkelanjutan dan stabilitas politik.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Fadlia, F., & Ramadani, I. (2018). Perang terhadap Narkoba ala Duterte (Analisis Political Culture): Jurnal Review Politik, 8(1).
- Gunakaya, W. (2015). Peranan dan Prospek International Criminal Court sebagai International Criminal Policy dalam Menganggulangi International Crimes: Jurnal Wawasan Yuridika, 29(2), 789-836.
- Human Rights Watch. (2017). License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs. Diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/philippines0317_insert.pdf
- Human Rights Watch. (2020). Philippines Events of 2020. Diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/philippines>
- International Criminal Court (ICC). (2025). How The Court Works. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>

- International Criminal Court (ICC). (2025). Procedural History and Case Documents on Rodrigo Duterte. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/>
- Ronsumbre, G. M., & Putri, D. K. (2019). ICC Jurisdiction of the President of the Philippines, Rodrigo Duterte. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171599>
- Tempo.co. (2025). Kronologi Penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh ICC. Diakses dari <https://www.tempo.co/>
- Verfassungsblog. (2025). The Price of Getting Duterte. Diakses dari <https://verfassungsblog.de/the-price-of-getting-duterte/>